

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Pengantar**

Pasca bencana tahun lalu Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang paling terdampak di NTB. Masa pemulihan pasca bencana tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali pulih seperti sebelum terjadinya bencana, dalam rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah daerah menargetkan pemulihan bencana dalam waktu 84 Minggu tetapi dari telah dimulainya pemulihan tahap awal sampai pada saat ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat dikarenakan masih terjadinya permasalahan dalam pemulihan pasca khususnya di Sektor pemukiman. Permasalahan yang lain adalah pemerintah dalam melaksanakan penanganan pemulihan pasca bencana masih mengedepankan konsep pelayanan, sehingga tidak ada gerakan nyata kesinergian antar elemen stakeholder dalam penanggulangan bencana. indikasi tersebut terlihat dari pasifnya dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan secara otomatis hanya mengandalkan komando dari pemerintah. Pada pemulihan pasca bencana Lombok pemerintah telah menetapkan rencana aksi dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang meliputi Sektor Pemukiman, Sosial, Infrastruktur, Ekonomi, serta Lintas Sektor sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh baik BNPB maupun pemerintah pusat, di beberapa daerah juga telah dilakukan hal serupa untuk melakukan rencana aksi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

(Coffey, 2017) pada kasus pasca bencana letusan Gunung Merapi dan Sinabung pemerintah juga telah menetapkan untuk melakukan proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui berbagai sektor di antaranya Sektor Pemukiman, Sosial, Infrastruktur, Ekonomi, serta Lintas Sektor. Pada kasus pasca bencana letusan merapi pemulihan awal yang dilakukan oleh pemerintah setempat meliputi memulihkan fungsi dan layanan dasar pemerintah, infrastruktur, serta kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara memulihkan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang terkena dampak yang vital untuk proses pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) jangka panjang. Memberikan stimulus untuk pemulihan mata pencaharian ekonomi dan pendapatan. Tak hanya itu penelitian (Kurnia, 2017) tentang pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca gempa 30 september 2009 di Sumatera Barat pemerintah menetapkan rencana aksi pemulihan pasca bencana meliputi pada kegiatan 4 sektor yaitu: Sektor Perumahan, Sektor infrastruktur, gedung pemerintahan, Sektor Sosial, Sektor ekonomi produktif.

Banyak peneliti yang membahas terkait dengan pemulihan pasca bencana tetapi sedikit yang membahas tentang pemulihan dari masing-masing sektor lebih banyak kepada sektor pemukiman dan ekonomi untuk itu peneliti mencoba akan membahas tentang pemulihan pasca bencana yang terjadi di Lombok Utara dari semua sektor yang baik yang sudah di jelaskan oleh beberapa ahli atau Peraturan perundang-undangan tentang bencana alam. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah mengingat melakukan pemulihan pasca

bencana bukan suatu yang mudah namun pemulihan perlu adanya keberlanjutan untuk yang akan datang.

Penelitian (Budy, 2007) tentang pengalaman pemulihan dan rekonstruksi setelah tsunami Desember 2004 yang menghancurkan Aceh pada saat itu, bencana Aceh merupakan bencana terbesar yang ada di Indonesia yang mengakibatkan kematian 167.000 jiwa, menghancurkan banyak perumahan dan infrastruktur, serta aktifitas pemerintahan dan ekonomi menjadi terhambat, fokus penelitian yang dilakukan meliputi pemulihan sektor perumahan, Ekonomi, pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pemulihan pasca bencana Aceh melalui pembangunan rumah warga terdampak, membangun kembali fasilitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur hingga perbaikan ekonomi warga dalam 2 tahun pemulihan mendapat hasil yang memuaskan bagi pemerintah dan masyarakat, tentu dalam mencapai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Berikut pembahasan dari masing-masing sektor yaitu Sektor Pemukiman, Ekonomi dan Sosial, Infrastruktur dan Lintas Sektor.

## **5.2 Sektor Pemukiman**

Pasca terjadinya bencana gempa bumi yang terjadi di NTB khususnya Lombok Utara telah menyebabkan berbagai dampak yang merugikan masyarakat khususnya pemerintah, sektor perumahan yang menjadi objek vital bagi kehidupan masyarakat pun sangat terdampak seperti yang sudah disebutkan hampir 50 Ribu rumah rusak baik yang rusak berat, ringan maupun sedang, upaya untuk merehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan pemerintah pun telah

dilaksanakan hingga saat ini, tetapi banyak yg menjadi masalah saat pembangunan rumah warga dari awal pelaksanaan sampai pada saat ini, dari keadaan birokrasi yang berbelit-belit sampai masih adanya masyarakat yang belum menerima dana stimulan perbaikan rumah. Melihat dari tahapan dari pemberian bantuan rekening perbaikan rumah sampai pada saat realisasi sangat jelas terlihat bahwa antara rencana, waktu pelaksanaan dan realisasi sangat minim prestasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari banyak terjadinya nama ganda pada Surat Keputusan (SK) Bupati yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tidak akuratnya penilaian tingkat kerusakan pada tahap assessment, sehingga verifikasi dan validasi dilakukan berulang kali, masyarakat enggan membentuk Pokmas dan cenderung menerima langsung dalam bentuk tunai tanpa melalui pokmas oleh karena rumitnya birokrasi, Bank BRI melakukan Verifikasi dan Validasi ulang terhadap penerima bantuan, sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama serta terlalu banyaknya pilihan RTG yang direkomendasi oleh Pemerintah, sehingga masyarakat bingung dan sulit menentukan pilihan. Inilah beberapa hal yang menjadi permasalahan sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangat tidak maksimal, apalagi banyak masyarakat yang mengeluh dikarenakan sampai pada saat ini belum menerima SK pemberian bantuan rumah. Kendala lain yang dihadapi misalnya, kurangnya sumber daya manusia dan lambatnya proses distribusi material bangunan. "Beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya tenaga kerja lapangan, lambatnya pembentukan pokmas dan proses verifikasi data,

lambatnya pengadaan dan distribusi material bangunan, serta kepercayaan masyarakat terhadap fasilitator

(Christ, Samekto, & Nuh, 2017) Belajar dari pengalaman erupsi merapi 2010 tentang rekonstruksi permukiman berbasis masyarakat di Kabupaten Cangkringan pemerintah menggunakan sistem Rekompak yang diadopsi dari keberhasilan pemulihan di Aceh dan Bantul. Sistem ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam rekonstruksi permukiman. Setiap fase dalam Rekonstruksi Permukiman Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cangkringan seperti perencanaan, konstruksi, kontrol dan evaluasi, melibatkan masyarakat, Masyarakat mengambil peran penting dalam proses rekonstruksi, hasil dari program ini bagi masyarakat benar-benar di rasakan dengan baik. berbeda dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi menekankan bahwa dalam pembangunan kembali rumah warga perlunya keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah akan tetapi pada kenyataannya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan rekonstruksi rumah keterlibatan partisipasi masyarakat masih kurang, dibentuknya Kelompok Masyarakat atau POKMAS memang dinilai baik untuk membawa semangat gotong royong akan tetapi tidak berjalan secara maksimal karena sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pihak ketiga dalam pembangunan rumah, dari segi pengawasan pemerintahpun masih lemah ini terlihat dari banyaknya rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi rumah tahan gempa, serta banyaknya aplikator yang korupsi uang dana stimulan rumah. Penelitian dari (Ophiyandri,

Amaratunga, Pathirage, & Keraminiyage, 2013) mengungkapkan keberhasilan Aceh, Nias dan Yogyakarta dalam merekonstruksi perumahan di dukung oleh beberapa faktor yaitu, transparansi dan akuntabilitas, strategi / kebijakan rekonstruksi yang tepat, dan pemahaman tentang metode berbasis masyarakat, partisipasi dan kontrol masyarakat serta koordinasi dan komunikasi yang baik. Tanpa adanya transparansi dari pemerintah tentu masyarakat menaruh ketidakpercayaan kepada pemerintah serta akan berdampak kepada faktor keberhasilan yang lainnya.

Pemerintah seharusnya melakukan mengevaluasi dikarenakan banyaknya permasalahan yang masih terjadi di masyarakat khususnya rekonstruksi rumah warga sebab rekonstruksi menjadi suatu yang penting bagi kehidupan masyarakat. (Taheri Tafti & Tomlinson, 2013) mengatakan pemulihan perumahan setelah bencana dapat dilihat dari dua perspektif: hak asasi manusia dan kesetaraan. yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah setiap masyarakat harus terpenuhi haknya atas rumah yang telah dimiliki dan pemerintah harus menjamin atas hak tersebut karna dalam Undang-Undang pemerintah harus menjamin dari hak masyarakat, dalam hal kesetaraan pemerintah tidak harus membeda-bedakan masyarakat dalam mendapatkan pemulihan pasca bencana khususnya dalam sektor perumahan. Dimana dalam pemulihan bencana itu sendiri haruslah berlandaskan asas keadilan, meskipun rumah masyarakat yang terdampak bencana yang sebelumnya memiliki rumah yang dalam kategori besar.

### **5.3 Sektor Ekonomi**

Sektor ekonomi menjadi suatu hal penting yang harus di prioritaskan dan bersifat segera oleh pemerintah dalam pemulihan pasca bencana karena ekonomi menjadi ujung tombak dari penghidupan masyarakat, setelah terjadinya bencana gempa bumi mengalami perekonomian yang lumpuh total dikarenakan fasilitas perdagangan dan fasilitas ekonomi yang lain mengalami kerusakan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Lombok Utara, 60 % Pendapatan dari pemerintah daerah berasal dari Pariwisata, meskipun perbaikan sarana-prasarana pariwisata sudah dilakukan akan tetapi itu tidak cukup untuk menarik wisatawan datang ke Lombok Utara perlu adanya langkah strategis dari pemerintah dalam pemulihan pariwisata contoh konkrit yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain melakukan perbaikan fisik adalah dengan mengembalikan citra pariwisata Lombok Utara, karena citra merupakan kesan atau penilaian yang diberikan publik terhadap objek pariwisata yang ada di Lombok Utara pasca terjadinya gempa pada tahun 2018 pariwisata NTB khususnya Lombok Utara mendapat citra yang negatif dari berbagai wisatawan sehingga para wisatawan berfikir kembali untuk datang ke Lombok, tentu pemerintah harus berupaya sedemikian rupa untuk mengembalikan citra pariwisata yang ada di Lombok Utara. Selain itu pemulihan ekonomi juga di sinergikan dengan program pemerintah daerah yaitu menciptakan 10.000 Wira Usaha Baru akan tetapi skema yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan peralatan penunjang bagi pelaku UMKM, sejauh ini 1 (satu) tahun berjalan peneliti melihat upaya ini masih sangat jauh dari yang diharapkan, masyarakat dituntut untuk melangkahi birokrasi yang cukup rumit,

pemerintah harusnya mempunyai langkah yang tegas terhadap program ini, OPD terkait harusnya memverifikasi berapa pelaku usaha yang ada di Lombok Utara tidak dengan sebaliknya yang masyarakat harus datang ke pemerintah itu sendiri, (Joakim & Wismer, 2015) belajar dari pemulihan pasca gempa Yogyakarta pada tahun 2006 untuk pemulihan sektor ekonomi masyarakat Bantul membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa pulih kembali, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bantul hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Lombok Utara seperti memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dan memberikan bantuan peralatan untuk mendukung usaha masyarakat akan tetapi pemerintah tidak mendirikan lembaga keuangan mikro untuk memberikan dukungan modal pelaku usaha untuk baik pelaku usaha UMKM yang sudah terbentuk maupun akan dibentuk serta masyarakat diberi dukungan pemasaran dan jaringan untuk mempromosikan penjualan produk mereka, inilah yang harus diupayakan oleh pemerintah Lombok Utara dalam membantu para pelaku usaha UMKM sebab peralatan tanpa dukungan modal tentu tidak akan berjalan secara maksimal. Senada dengan (Dinda, 2018) dalam penelitian tentang pemulihan pasca bencana Gunung Sinabung pada pemulihan ekonomi pemerintah memberikan kursus keterampilan kepada masyarakat dan memberi modal untuk usaha kecil dan menengah dan pemerintah sendiri membuka lapangan pekerjaan berbasis keterampilan ekonomi kreatif. Dari beberapa daerah yang telah dijelaskan pemerintah Lombok Utara harusnya secara serius untuk memberi pendampingan kepada masyarakat secara berkelanjutan. penelitian lain dari (Budy, 2007) tentang pemulihan ekonomi di Aceh pemerintah telah menetapkan



beberapa langkah Pertama, langkah-langkah diambil untuk memulihkan sektor pertanian dan perikanan melalui revitalisasi lahan pertanian dan perkebunan, membangun kembali pelabuhan, dan mengganti kapal nelayan yang hilang. Kedua, keuangan mikro, bentuk-bentuk kredit murah lainnya, dan bantuan disediakan untuk usaha kecil dan menengah. Ketiga, program ketenagakerjaan seperti uang tunai untuk pekerjaan dan program pelatihan dikembangkan. Penelitian lain dari (Zeng, Zhang, Ning, Tang, & Gong, 2019) Pada 12 Mei 2008, gempa bumi besar dengan skala Richter 8,3M terjadi di Aba Prefektur Tibet dan Prefektur Qiang di Provinsi Sichuan kota dujiangyan dalam artikel ini menjelaskan strategi pemulihan pasca bencana dan pengembangan mata pencaharian masyarakat di dujiangyan. Pemerintah telah menetapkan dan meningkatkan lapangan kerja serta sistem layanan jaminan sosial agar adanya peningkatan pendapatan ekonomi penduduk, tidak hanya dari segi ekonomi pemerintah sendiri juga telah menjamin penduduknya untuk pembangunan perumahan akibat gempa yang terjadi, memberikan peningkatan layanan kesehatan dan juga jaminan untuk wajib belajar dan pendidikan khusus serta membebaskan uang sekolah dan biaya lain-lain untuk 45.030 siswa, pemerintah juga telah melakukan upaya memperbaiki infrastruktur, layanan publik yang rusak di akibatkan oleh gempa yang terjadi. hasil dari upaya tersebut mencapai hasil yang memuaskan hal ini tercermin dalam peningkatan kualitas hidup penduduk, pemerataan dalam pendidikan, pemulihan tempat tinggal, optimalisasi sistem medis dan kesehatan, dan peningkatan layanan transportasi umum. Jika melihat kasus ini pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan jaminan hidup

sebesar Rp. 900.000,- untuk tiga bulan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana tetapi yang menjadi permasalahan adalah sampai pada saat ini dana jaminan hidup itu belum teralisasi, ini merupakan salah satu alasan masyarakat tidak puas akan pemulihan yang terjadi di Lombok Utara, masyarakat berkali kali meminta penjelasan kepada BPBD maupun pemerintah daerah untuk merealisasikan tetapi alasan dari pemerintah daerah sendiri mengatakan bahwa kementerian sosial sedang berkoordinasi dengan kementerian keuangan, harusnya pemerintah daerah menanyakan dari konsistensi pemerintah pusat dalam membantu pemulihan pasca bencana.

#### **5.4 Sektor Sosial**

Pada sektor sosial seperti yang sudah dijelaskan di awal pemulihan dilakukan melalui bidang Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan serta budaya, prioritas pemerintah pada sektor ini adalah pendidikan dan kesehatan, karena bidang tersebut merupakan objek vital terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, pemerintah telah membangun gedung sekolah dengan skema tahan terhadap gempa, membangun sekolah yang tahan terhadap gempa dapat dianggap sebagai langkah pertama untuk membuat sekolah tangguh dalam menghadapi gempa yang akan datang (Baytiyeh, 2019). Belajar dari gempa di Cina Sebelum membangun gedung dilakukan survei geologis terlebih dahulu untuk mengidentifikasi topografi, geologi, dan kemudian membangun bangunan di daerah di mana bangunan tahan gempa serta diusahakan untuk menghindari lokasi bangunan yang aseismik. Perlu dicatat bahwa dalam hal apa pun, sekolah tidak boleh dibangun di atas patahan aktif, tanah longsor, atau pencairan tanah, yang

berada di area tahan gempa. Ini akan mencegah gedung sekolah dari kerusakan parah akibat gempa bumi (Duan, Bo, Li, & Su, 2018). begitupun dengan gedung pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas pemerintah harusnya melakukan kajian mendalam terlebih dahulu, mengambil kebijakan yang tepat adalah salah satu dari keberhasilan pemulihan pasca bencana, tapi lagi-lagi tidak semudah itu untuk pemerintah Lombok Utara dalam menata atau mengkaji kembali dikarenakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit jika membangun gedung sekolah atau puskesmas di tempat lain, apalagi kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang baru berdiri selama 10 tahun.

### **5.5 Sektor Infrastruktur**

Pemulihan infrastruktur dilakukan melalui bidang transportasi (darat dan laut), Sumber Daya Air dan Irigasi, Air Bersih dan Sanitasi, Energi Listrik, Pos dan Telekomunikasi, berbagai upaya dalam pemulihan sektor infrastruktur telah dilakukan oleh pemerintah salah satu hal terpenting ialah pemenuhan air bersih dan sanitasi pasca bencana merupakan suatu hal yang paling mendasar dan tentu menjadi prioritas dalam pemulihan pasca bencana yang terjadi di Lombok Utara terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, dampak gempa bumi terhadap PDAM Lombok Utara menyebabkan kerusakan jaringan perpipaan yang mengakibatkan terganggunya pendistribusian air bersih dan penurunan pendapatan dari harga penjualan air. Perlu ditambah beberapa titik sumur bor untuk menyediakan air bersih di lokasi strategis selama bencana gempa bumi. Selain itu, pihak PDAM harus meningkatkan kekuatan dan keamanan jaringan perpipaan yang ada dari gempa bumi untuk mengurangi resiko.membuat

para warga kesulitan dalam mendapatkan air bersih, tentu dalam perbaikan jaringan PDAM tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. diketahui sebelum terjadinya bencana air bersih menjadi problem bagi sebagian masyarakat di Lombok Utara karena seringnya terjadi kekeringan apalagi setelah terjadinya bencana masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan air bersih. Salah satu tantangan pemerintah daerah Lombok Utara ialah menyediakan akses berkelanjutan ke air bersih dan sanitasi dikarenakan bantuan sumur bor yang ada di masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan apalagi bagi masyarakat yang sering mengalami kekeringan, pemerintah harusnya merencanakan untuk pembuatan bendungan untuk menampung air hujan dan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sampai pada akhir tahun 2019 pun kekeringan masih terjadi di sebagian wilayah dan sumur bor yang telah dibuat pasca terjadinya bencana ikut mengalami kekeringan.

## **5.6 Lintas Sektor**

Pemulihan lintas sektor dilakukan melalui bidang pemerintah, pengurangan resiko bencana, ketertiban dan keamanan serta perbankan pada bidang pemerintah pasca terjadinya bencana gempa bumi pelayanan publik menjadi terhambat pemerintah selama beberapa minggu pasca bencana lebih fokus kepada perbaikan sarana prasarana pemerintahan terlebih dahulu terkecuali pada aspek pelayanan kesehatan, untuk pembangunan gedung pemerintahan pemerintah hendaknya terlebih dahulu melakukan kajian dimana tempat gedung pemerintah aman untuk di bangun kembali yang tak kalah penting menjadi sorotan dalam diskusi ini adalah Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang akan

datang sebab potensi adanya bencana di Lombok masih sangat besar untuk itu sangat penting PRB menjadi prioritas pemerintah daerah selain merekonstruksi di bidang lain. Pemerintah daerah mempunyai kapasitas atau peran penting dalam pengurangan resiko bencana, pengurangan risiko bencana menjadi suatu kebutuhan yang harus direncanakan secara sistematis oleh pemangku kepentingan dalam menghadapi resiko bencana yang akan datang, pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat bisa menjadi jawaban dalam hal tersebut pemerintah harus melibatkan masyarakat serta memberikan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat, penelitian dari (Pascapurnama et al., 2018) belajar dari Jepang negara yang rawan akan adanya resiko bencana, pendidikan bencana di Jepang telah diterapkan sejak sedini mungkin kepada anak-anak sekolah yang dinamakan Sekolah Siaga Bencana (SSB) pemerintah Jepang menyadari bahwa siswa adalah salah satu ujung tombak dalam pencegahan dan tanggapan bencana. Di sekolah, pendidikan bencana diatur berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang serta pendidikan kebencanaan telah masuk ke kurikulum sekolah, misalnya, di tingkat sekolah dasar, siswa diajarkan mengenali jenis-jenis bencana, mengetahui peran pekerja publik seperti petugas pemadam kebakaran, dan mencegah cedera ketika terjadi bencana. Siswa sekolah menengah diajarkan untuk merawat luka, menjaga sanitasi dan kebersihan, dan belajar memasak di luar ruangan. Kemudian di sekolah menengah, pendidikan bencana menjadi lebih detail dan kompleks. Di tingkat masyarakat umum pemerintah harus melibatkan dalam hal kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dari bencana alam. PRB berbasis masyarakat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara

positif dan aktif dalam rencana PRB sehingga mereka dapat diberdayakan dan memiliki peningkatan kapasitas mereka untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap bahaya alam. Di Indonesia, kegiatan-kegiatan dalam PRB berbasis masyarakat secara umum memang telah di terapkan tetapi sangat sedikit pemerintah yang paham akan konsep dari PRB berbasis masyarakat tersebut atau tidak berjalannya secara efektif. Pasca terjadinya Gempa Bumi di Lombok Utara pemerintah memang telah menerapkan di beberapa sekolah program Sekolah Siaga Bencana (SSB) ini merupakan langkah baik yang telah di lakukan oleh pemerintah yang perlu mencedi evaluasi adalah tidak hanya memberikan sekedar simulasi kebencanaan akan tetapi harus dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan sekolah agar bisa bertahan pada resiko bencana mendatang serta agenda PRB harus masuk kedalam ke dalam rencana pembangunan daerah. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki posisi strategis sebagai perencana PRB serta pemerintah daerah harus membuat pemetaan resiko bencana agar memudahkan dalam perencanaan PRB tersebut. Pengurangan resiko berbasis masyarakat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kerentanan masyarakat, agar mampu menolong diri sendiri dan kelompoknya dalam menghadapi ancaman bahaya dari bencana itu sendiri. dengan di berikan pemahaman ataupun memberikan partisipasi pengurangan resiko bencana masyarakat akan tanggap dan sadar bahwa mereka hidup di daerah rawan bencana serta mempunyai kapasitas yang memadai dalam menghadapi bencana yang akan datang.

Untuk mengurangi resiko bencana yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan merencanakan dibeberapa wilayah di Lombok Utara pasca Gempa Bumi tidak layak untuk di tempati namun, namun pendapat masyarakat menolak akan hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mau meninggalkan rumah dan tempat tinggal yang selama ini mereka tempati masyarakat, disisi lain tidak mungkin dalam dalam waktu cepat untuk merelokasi perlu ada tahapan yang jelas serta Pemerintah harus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bisa meninggalkan wilayah rawan bencana, Pemerintah juga tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit karena pada pemulihan awal ini pemerintah fokus kepada pemulihan ekonomi, sosial dan pemukiman.